

## The Effect of Clarity of Budget Targets and Decentralization on Regional Government Performance (Empirical Study at the Department of Industry and Trade, North Sulawesi Province)

Wehara Mariana Sigar<sup>1\*</sup>, David P. E. Saerang<sup>2</sup>, Sonny Pangerapan<sup>3</sup>  
Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Wehara Mariana Sigar [Weharasigar16@gmail.com](mailto:Weharasigar16@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Clarity of Budget Targets, Decentralization, Local Government Performance

*Received :* 05, September  
*Revised :* 07, October  
*Accepted:* 09, November

©2023 Sigar, Saerang, Pangerapan :  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The aim of this research is to find out whether clarity of budget targets and decentralization have a partial and simultaneous effect on local government performance. This hypothesis was tested using the t test and f test. The research sample consisted of 31 employees, namely ASN in the Secretariat sector, Legal and Personnel Sub-Section, and Planning and Finance Sub-Section, and the Head of the Department of Industry and Trade. The research method uses a questionnaire with Likert scale measurements. The analytical method used is multiple linear regression analysis where the data analysis process is carried out using SPSS version 26 computer technology. The results of this research show that clarity of budget targets has a positive and significant effect on local government performance, while partial decentralization has no effect on performance. local government; Furthermore, clarity of budget targets and decentralization simultaneously influence regional government performance.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Disperindag Prov. Sulawesi Utara)

Wehara Mariana Sigar<sup>1\*</sup>, David P. E. Saerang<sup>2</sup>, Sonny Pangerapan<sup>3</sup>

Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Wehara Mariana Sigar [Weharasigar16@gmail.com](mailto:Weharasigar16@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

**Kata Kunci:** Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, Kinerja Pemerintah Daerah

*Received : 05, September*

*Revised : 07, October*

*Accepted: 09, November*

©2023 Sigar, Saerang, Pangerapan :

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang. Sampel penelitian berjumlah 31 orang pegawai yaitu ASN bidang Sekretariat, Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Kepala Bidang Disperindag. Metode penelitian menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala *Likert*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda di mana proses analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi komputer *SPSS versi 26*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan desentralisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah; selanjutnya kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

## PENDAHULUAN

Era reformasi tahun 1999 dimulai dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia terkait pelaksanaan otonomi daerah. Adanya reformasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap manajemen keuangan daerah. Pemerintah melakukan perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan daerah bisa menjadi lebih mandiri memiliki hak dan kewajiban dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri.

Perubahan aspek reformasi yang paling dominan adalah pada aspek pemerintahan. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah. Selain itu, tuntutan atas perubahan organisasi publik baik secara individu ataupun anggota kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada organisasi.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran juga tercakup dalam Rencana Strategi Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dengan adanya organisasi publik baik secara individu ataupun anggota kelompok sangat diharapkan, perubahan ini sering ditujukan kepada aparatur pemerintah menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada organisasi. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian

organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja tersebut efektif atau tidak efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja.

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada pimpinan, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pemerintah daerah. Oleh karena itu, kinerja sendiri merupakan hasil akhir *output* organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang diberikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, maka SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan variabel yang banyak dihubungkan dengan kinerja pemerintah daerah seperti penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Aprilianti, Wulan, dan Kurniawan (2020) Sembiring, Sudirman, dan Silitonga (2020) melakukan penelitian yang sama mengenai variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun variabel desentralisasi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhyannuddin (2021) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas public, desentralisasi anggaran, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bireuen bahwa desentralisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada dasarnya penelitian ini akan melihat pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada Disperindag Prov. Sulut. Dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan sebagai instrument penelitian yaitu akan dilakukan pada seluruh Aparatur Sipil Negara Bidang Sekretariat, Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif dibidang ekonomi (Syaiful Bahri 2020). Menurut Sastroatmodjo dan Purnairawan (2021 : 1) Akuntansi merupakan suatu teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pada transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis yang tersaji dalam bentuk laporan keuangan yang bermanfaat untuk setiap pihak yang memerlukan laporan keuangan sebagai langkah pengambilan keputusan.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Pramudiana (2017:12) Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntansi pemerintahan merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi 2017:1).

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Menurut (Kenis, dikutip dalam Dalimunthe 2018:7) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan pegawai untuk menyusun target-target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifikasi dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Dalimunthe 2021:21).

### **Desentralisasi**

Menurut Suryani dan Pujiono (2020:172) menyatakan bahwa Desentralisasi akan menentukan tingkat otonomi yang didelegasikan pada manajerial agar manajerial memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang lebih rendah untuk mengambil kebijakan secara independen (Ikhyanuddin 2021:712).

## **Kinerja**

Menurut Rismawati dan Mattalata (2018:2) kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Suatu pertanggungjawaban kinerja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan indikator kinerja. Menurut Mayasari (2021:25) Indikator kinerja adalah ukuran atau hasil yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan melalui masukan, keluaran, proses, hasil, manfaat hingga dampak. Kinerja pemerintah dalam menampakkan hasil yang baik di wilayah provinsi, kabupaten maupun kota wajib dapat menerapkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan tanggungjawab pemerintahan. Untuk itu masyarakat menuntut pemerintah supaya memiliki kinerja yang baik dalam penerapan tugas dan tanggungjawab selaku perwujudan konsep otonomi daerah. Pemerintah memiliki kinerja yang baik apabila dapat mengelola pemerintahan sehingga bisa menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Jais, dikutip dalam Mayasari 2021: 25).

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yakni mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menganalisis data dalam bentuk angka yang dalam praktiknya diberikan perlakuan tertentu yang diteliti di dalamnya. Dalam penelitian ini strategi penelitian kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas kejelasan sasaran anggaran (X1), dan desentralisasi (X2) terhadap variabel Y (variabel terikat) yaitu kinerja pemerintah daerah (Y).

Populasi dalam penelitian ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penentuan populasi didasarkan pada relevansi karakteristik populasi yang akan diteliti dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 31 dari 50 populasi yang terdiri dari seluruh ASN bidang sekretariat, sub bagian hukum dan kepegawaian, dan sub bagian perencanaan dan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Variabel penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dipilih yaitu Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Untuk pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan pengukuran dengan skala *Likert*. Skala *Likert* yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2021 : 146). Dengan menggunakan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator variabel yang telah dinyatakan di atas. Skor yang menjadi pengukuran variabel dengan skala *Likert* ini terdiri dari 5 poin yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara alamat di Jln. Tololiu Supit No. 25 Tingkulu, Kec Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan September 2022 sampai dengan Bulan November 2022.

## HASIL PENELITIAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Adapun hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	31	20	25	23.32	1.904
X2	31	20	25	22.65	1.836
Y	31	20	25	22.87	1.746
Valid N (listwise)	31				

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Pada Tabel.1 , menunjukkan hasil dari uji statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian yang telah diteliti. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa N pada setiap variabel valid adalah 31. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum 25 dengan nilai rata-rata *mean* sebesar 23,32 dan standar deviasi sebesar 1,904. Variabel Desentralisasi (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,65 dan standar deviasi 1,836. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 20 dan nilai maximum 25 dengan nilai rata-rata sebesar 22,87 dan standar deviasi sebesar 1,746.

Semua variabel memiliki nilai standar deviasi kurang dari nilai *mean* yang mengartikan bahwa penyimpangan rendah. Penyimpangan data rendah berarti nilai data telah terdistribusi dengan merata.

## Uji Validitas dan Relibialitas

### a. Uji Validitas

Untuk menguji validitas atau tingkat keakurasian data penelitian ini menggunakan SPSS Versi 26. Dengan melakukan uji *Pearson Correlation* dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai uji  $<0,05$  maka data atau kuesioner dinyatakan valid. Demikian juga dengan nilai  $r$  hitung harus lebih besar dari nilai  $r$  tabel supaya kuesioner dapat dikatakan valid. Responden pada penelitian ini berjumlah 31 Responden, maka  $N=31$  pada tingkat signifikansi 0,05 didapat  $r$  tabel sebesar 0,361. Hasil uji validitas dari setiap variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6:

**Tabel.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran**

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	X1	0,812	0,361	Valid
	X2	0,740	0,361	Valid
	X3	0,819	0,361	Valid
	X4	0,812	0,361	Valid
	X5	0,793	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Hasil uji Validitas yang ada pada Tabel.2 menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran yang terdiri atas 5 pertanyaan dilihat pada kolom  $r$  hitung (*Corrected Item Total Correlation*) nilai korelasinya lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada variabel kejelasan sasaran anggaran dinyatakan valid.

**Tabel.3 Hasil Uji Validitas Variabel Desentralisasi**

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Desentralisasi (X2)	X1	0,774	0,361	Valid
	X2	0,755	0,361	Valid
	X3	0,755	0,361	Valid
	X4	0,739	0,361	Valid
	X5	0,583	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan Tabel.3 menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada variabel desentralisasi yang terdiri dari 5 pertanyaan dilihat pada kolom  $r$  hitung (*Corrected Item Total Correlation*) nilai korelasinya lebih besar dari nilai  $r$  tabel. Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada variabel desentralisasi dinyatakan valid.

**Tabel.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pemerintah Daerah**

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	X1	0,785	0,361	Valid
	X2	0,572	0,361	Valid
	X3	0,754	0,361	Valid
	X4	0,724	0,361	Valid
	X5	0,697	0,361	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan Tabel.4 menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada variabel kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari 5 pertanyaan dilihat pada kolom r hitung (*Corrected Item Total Correlation*) nilai korelasinya lebih besar dari nilai r tabel. sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pada variabel kinerja pemerintah daerah dinyatakan valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Elvera dan Astarina 2021 : 122). Untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andal atau reliable.

**Tabel.5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,854	Reliabel
Desentralisasi	0,775	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	0,750	Reliabel

Sumber Hasil Pengolahan Data, 2022.

Dari hasil uji reliabilitas pada Tabel.5 menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* untuk variabel kejelasan sasaran anggaran adalah 0,854, untuk variabel desentralisasi sebesar 0,775, dan variabel kinerja pemerintah daerah 0,750. Hasil data tersebut menyatakan bahwa nilai *cronbach alpha* tidak ada yang kurang dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diterima, baik, dan dapat dinyatakan reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

**Tabel.6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.05926009
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.122
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.142 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel.6, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil signifikansi sebesar 0,142 yakni  $>0,05$  yang artinya atau dapat disimpulkan bahwa semua variabelnya berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

**Tabel.7 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,91	1,099	Non Multikolinearitas
Desentralisasi	0,91	1,099	Non Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan Tabel.7 menunjukkan semua variabel memiliki nilai *tolerance*  $>0,10$  dan nilai VIF  $<0,10$  yang artinya semua variabel tidak terjadi gejala multikolinearitas (non multikolinearitas) atau bebas dari masalah multikolinearitas.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,007	Non Heteroskedastisitas
Desentralisasi	0,321	Non Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan Tabel.8 menunjukkan semua variabel memiliki nilai signifikansi >0,05 artinya dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga hasil uji asumsi klasik semuanya sudah terpenuhi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	5.389	4.164		1.294	.206
	X1	.734	.110	.800	6.658	.000
	X2	.016	.114	.017	.143	.887

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan Tabel.9, dapat dilihat bahwa pada kolom *unstandardized coefficients* (B) nilai *constant* sebesar 5,389, koefisien Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) sebesar 0,734, Desentralisasi (X2) sebesar 0,016. Dengan demikian maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 5,389 + 0,734X1 + 0,016X2 + e$$

### Uji Hipotesis

#### a. Koefisien Determinan (R)

**Tabel.10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>			Std. Error of the Estimate
	R	R Square	Adjusted R Square	
1	.795 <sup>a</sup>	.632	.606	1.096

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.

Berdasarkan Tabel.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,606 atau 60,6. Hal ini berarti bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah 60,6% sedangkan sisanya 39,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**b. Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel.11 Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	57.823	2	28.911	24.049	.000 <sup>b</sup>
	Residual	33.661	28	1.202		
	Total	91.484	30			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.*

Pada Tabel.11 diketahui bahwa tingkat signifikansi pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Desentralisasi (X2) adalah  $0,000 < 0,05$  hal ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dan nilai F hitung  $24,049 > F$  tabel 3,37. Artinya dengan kata lain secara simultan variabel independen Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Desentralisasi (X2) menyatakan berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel dependen Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

**c. Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel.12. Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Tmodel		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.389	4.164		1.294	.206
	X1	.734	.110	.800	6.658	.000
	X2	.016	.114	.017	.143	.887

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022.*

Berdasarkan Tabel.12, diketahui bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dapat dilihat bahwa nilai tersebut menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan kata lain variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan hasil pengujian hipotesis pertama Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 6,658 atau lebih besar dari t tabel 2,051. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

### **Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua Desentralisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah karena nilai signifikansinya dalam uji t sebesar 0,887 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,143 yang artinya lebih kecil dari t tabel 2,051. Hal ini menunjukkan bahwa Desentralisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan hasil pengujian hipotesis ketiga Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 24,049 lebih besar dari F tabel 3,376. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat, maka hipotesis pertama diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin jelas sasaran anggaran dalam penyusunan anggaran dapat berpengaruh terhadap kinerja pada pemerintah.
2. Desentralisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Dengan adanya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Disperindag Prov. Sulut maka disarankan kepada pihak instansi pemerintah diharapkan agar selalu berupaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan konsep terhadap penyusunan anggaran dan perencanaan anggaran yang sesuai dengan standar pemerintah yang sudah ditetapkan agar kinerja pada instansi pemerintah juga semakin meningkat. Hal ini karena mengingat dengan meningkatnya kinerja manajerial tentu akan meningkatkan prestasi kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian halnya dengan desentralisasi disarankan agar lebih meningkatkan kinerja manajerialnya melalui pelimpahan wewenang yang telah diberikan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Prof. Dr. David P. E. Saerang, SE., M.Com (Hons) dan Bapak Drs. Sonny Pangerapan, MM., Ak atas bimbingan dan arahnya selama penulis melakukan penyusunan artikel ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahri, S. 2020. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (EDISI III). Yogyakarta.
- Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurniawan. (2020), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 9(2), 150-159, 2020.
- Hardani, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintahan. *Bogor: In Media*.
- Ikhyanuddin. (2021), Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik Desentralisasi Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bireuen). *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2 No.2 Juli 2021.
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2018. *Intermediate Accounting IFRS Edition*. Second Edition. WILEY. United States.
- Nomor, P. P. (71). Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Rismawati, S. E., & Mattalata, S. E. (2018). *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan (Vol. 1)*. Celebes Media Perkasa.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Media Sains Indonesia.
- Sugiyono, D. (2019). *Statistika untuk Penelitian (Cetakan ke-30)*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga*. Alfabeta. Bandung.
- Sulis Nafisatun Khasanah, Ika Neni Kristanti. (2020), Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kapasitas Individu, Self Esteem dan Kejelasan Sasaran Terhadap Senjangan Anggaran Desa di Kecamatan Petanahan. *Jurnal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 2 (3), 411-425, 2020.
- Suryani, F., & Pujiono, P. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(1), 167-1.